

Katalog : 4102004.3273

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2020



<https://bandung>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BANDUNG**

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2020



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2020**

ISSN	: -
Katalog BPS	: 4102004.3273
Nomor Publikasi	: 3273.2041
Ukuran Buku	: B5 (17,6 x 25 cm)
Jumlah Halaman	: ix + 72 halaman
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Ilustrasi Sampul	: foto dari <a href="http://humas.bandung.go.id">humas.bandung.go.id</a>
Diterbitkan oleh	: @Badan Pusat Statistik Kota Bandung
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung

# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2020**

Tim Penyusun

Pengarah : Aris Budiyanto, S.ST, M.Si

Penanggung Jawab : Dra. Sri Sundari, MM

Naskah : Rahmawaty, S.Si, ME

Pengolah Data : Rahmawaty, S.Si, ME

Gambar Kulit, Desain dan *Layout* : Rahmawaty, S.Si, ME

Penyunting : Dra. Sri Sundari, MM

<https://bandungkota.bps.go.id>

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala karunia-Nya sehingga publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Tahun 2020 Kota Bandung berhasil disusun. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang kami susun guna menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Bandung. Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dengan data yang tersedia dan terukur. Adapun sumber data untuk publikasi ini yaitu Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018-2019, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 dan Publikasi Proyeksi Penduduk 2010-2020 Provinsi Jawa Barat.

Publikasi ini mencakup indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, taraf dan pola konsumsi serta indikator sosial lainnya di Kota Bandung.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Bandung, Desember 2020  
Kepala BPS Kota Bandung,

**Aris Budiyanto**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GRAFIK .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Ruang Lingkup.....	2
1.2 Sistematika.....	2
1.3 Sumber Data .....	2
1.4 Konsep dan Definisi.....	3
BAB II KEPENDUDUKAN .....	9
2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	10
2.2. Sebaran dan kepadatan penduduk .....	12
2.3. Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan .....	13
2.4. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama .....	16
2.5 Penggunaan Alat/Cara KB .....	18
BAB III KESEHATAN .....	21
3.1. Derajat dan Status Kesehatan .....	22
3.2. Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	25
3.3. Kesehatan Ibu dan Balita .....	27
BAB IV PENDIDIKAN .....	31
4.1. Rata-rata Lama Sekolah .....	32
4.2. Partisipasi Pendidikan .....	36
4.3. Tingkat Pendidikan.....	38
BAB V KETENAGAKERJAAN .....	42
5.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran .....	43
5.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan.....	46

## Daftar Isi

5.3.	Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	49
5.4.	Sektor Formal dan Sektor Informal .....	52
Bab VI	PERUMAHAN .....	55
6.1.	Kualitas Rumah Tinggal .....	56
6.2.	Fasilitas Rumah Tinggal .....	57
6.3.	Status Kepemilikan Rumah Tinggal .....	59
BAB VII	TARAF DAN POLA KONSUMSI .....	61
7.1.	Pengeluaran Rumah Tangga.....	61
7.2.	Konsumsi Energi dan Protein .....	67
BAB VIII	SOSIAL LAINNYA .....	71
8.1	Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	71
8.2	Perlindungan Sosial .....	73

## DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA BANDUNG, 2015-2019 (PERSEN) .....	11
GRAFIK 2. KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KOTA BANDUNG, 2019 (JIWA/KM <sup>2</sup> ) .....	13
GRAFIK 3 RASIO JENIS KELAMIN KOTA BANDUNG, 2015-2019 (PERSEN).....	14
GRAFIK 4. UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT, 2015-2019 (TAHUN) .....	22
GRAFIK 5. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENDERITA SAKIT SEBULAN YANG LALU MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA BANDUNG, 2017-2019 (PERSEN) .....	24
GRAFIK 6. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DAN BEROBAT JALAN DI KOTA BANDUNG 2019 (PERSEN) .....	26
GRAFIK 7. RATA-RATA LAMA SEKOLAH, KOTA BANDUNG 2017-2019 (TAHUN) .....	35
GRAFIK 8. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT,.....	36
GRAFIK 9. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA BANDUNG, 2017-2019 (PERSEN).....	45
GRAFIK 10. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA BANDUNG 2017-2019 .....	46
GRAFIK 11. PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG TERMASUK PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI KOTA BANDUNG 2019 (PERSEN).....	47
GRAFIK 12. PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SEMINGGU YANG LALU MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DI KOTA BANDUNG 2019 (PERSEN) .....	49
GRAFIK 13. PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT SATUS PEKERJAAN UTAMA DI KOTA BANDUNG, 2017-2019 (PERSEN) .....	50
GRAFIK 14. PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS KEGIATAN FORMAL DAN INFORMAL DI KOTA BANDUNG 2017-2019 (PERSEN) .....	53
GRAFIK 15. PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN, DI KOTA BANDUNG 2019 (PERSEN).....	54
GRAFIK 16. RATA-RATA KONSUMSI KALORI (KKAL) DAN PROTEIN (GRAM) PER KAPITA SEHARI DI KOTA BANDUNG, 2017-2019.....	68
GRAFIK 17. RATA-RATA KONSUMSI KALORI PER KAPITA SEHARI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG, 2019 (KKAL).....	69
GRAFIK 18. RATA-RATA KONSUMSI PROTEIN PER KAPITA SEHARI DI KOTA BANDUNG, 2019 (GRAM) .....	70

## DAFTAR TABEL

TABEL 1. JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG, 2015-2019 (JIWA) .....	10
TABEL 2. ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN KOTA BANDUNG, 2018-2019 (PERSEN).....	15
TABEL 3. PERSENTASE PEREMPUAN YANG PERNAH KAWIN DI KOTA BANDUNG, 2019 (PERSEN) ...	17
TABEL 4 PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN BERUMUR 15-49 TAHUN MENURUT STATUS PENGGUNAAN ALAT/CARA KB DI KOTA BANDUNG, 2019 (PERSEN).....	19
TABEL 5. ANGKA KESAKITAN BERDASARKAN KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG 2017-2019 .....	24
TABEL 6. PERSENTASE PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN YANG PERNAH MELAHIRKAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR PENOLONG PROSES KELAHIRAN TERAKHIR DI KOTA BANDUNG, 2017 – 2019 (PERSEN) .....	28
TABEL 7. PERSENTASE PEREMPUAN BERUMUR 15-49 TAHUN YANG PERNAH KAWIN YANG PERNAH MELAHIRKAN DALAM DUA TAHUN TERAKHIR MENURUT TEMPAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR DI KOTA BANDUNG, 2017-2018 (PERSEN) .....	29
TABEL 8. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (EYS) DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (MYS) .....	33
TABEL 9. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (EYS) DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (MYS) (TAHUN), KOTA BANDUNG 2017 - 2019 .....	34
TABEL 10. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 7-24 TAHUN KE ATAS MENURUT KARAKTERISTIK DAN STATUS PENDIDIKAN, KOTA BANDUNG 2019 .....	37
TABEL 11. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI, KOTA BANDUNG 2019 (PERSEN) .....	39
TABEL 12. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT IJAZAH TERTINGGI YANG DIMILIKI DAN KELOMPOK PENGELUARAN, KOTA BANDUNG 2019 (PERSEN).....	40
TABEL 13. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KOTA BANDUNG, 2017-2019 (PERSEN).....	44
TABEL 14. RUMAH TANGGA MENURUT BEBERAPA INDIKATOR KUALITAS PERUMAHAN DI KOTA BANDUNG 2018 -2019 (PERSEN) .....	56
TABEL 15. PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT BEBERAPA FASILITAS PERUMAHAN DI KOTA BANDUNG 2018-2019 (PERSEN) .....	58
TABEL 16. RUMAH TANGGA MENURUT STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG 2018-2019 (PERSEN) .....	60
TABEL 17. RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG, 2017-2019 .....	62
TABEL 18 RATA-RATA PERSENTASE PENGELUARAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN .....	65
TABEL 19. RATA-RATA PENGELUARAN NON MAKANAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG, 2019 (RUPIAH) .....	66
TABEL 20 PERSENTASE ANGGOTA RUMAH TANGGA 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGAkses INTERNET 3 BULAN TERAKHIR MENURUT KARAKTERISTIK DI KOTA BANDUNG, 2018-2019 .....	72
TABEL 21. PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT JENIS PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG DITERIMA DI KOTA BANDUNG, 2018-2019 (PERSEN) .....	74





## BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan perwujudan pelaksanaan pencapaian tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dasar ini dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat. Untuk itu, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam rencana pembangunan yang pada akhirnya diimplementasikan dalam program-program pembangunan.

Sebagai bagian dalam masyarakat internasional, Indonesia telah menyetujui untuk mengadopsi standar dan norma yang berlaku secara internasional. Pendekatan terpadu sasaran-sasaran pembangunan yang lebih konkret, terukur dan kuantitatif secara universal tercantum dalam tujuan pembangunan yang tercetus dalam SDGs (*Sustainable development Goals*). SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (hingga tahun 2030) guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh Negara (universal), sehingga seluruh Negara tanpa kecuali Negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs.

Data dan informasi mengenai keadaan masyarakat setiap tahunnya merupakan hal penting dalam pembangunan. Salah satu informasi yang terkait dengan pembangunan yaitu gambaran keadaan masyarakat mengenai kehidupan sosial ekonominya. Ketersediaan indikator sosial dari suatu daerah sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mengevaluasi pembangunan agar tepat sasaran dan efisien.

Publikasi atau gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat ini diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana perkembangan kesejahteraan penduduk yang telah dicapai, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi Indikator Kesejahteraan Rakyat ini masih bersifat makro mengingat dimensi cakupan kesejahteraan



yang sedemikian luasnya. Namun demikian, publikasi ini diharapkan banyak membantu dalam analisis sosial ekonomi kesejahteraan penduduk di Kota Bandung.

### 1.1 Ruang Lingkup

Tingkat kesejahteraan rakyat meliputi kesejahteraan materil dan non materil. Kesejahteraan materil meliputi pendapatan, kepemilikan harta benda, termasuk keadaan fisik rumah tempat tinggal bersama fasilitasnya. Sedangkan kesejahteraan non materil meliputi keadaan pendidikan, kesehatan, kebersihan dan lain lain.

Pembahasan dalam publikasi ini, tidak saja yang bersifat materil tetapi juga yang bersifat non materil. Karena tidak semua aspek non materil dapat diukur, sehingga yang dibahas hanya masalah sosial dan demografi yang dapat diukur dan dianggap penting sebagai komponen yang dominan berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

### 1.2 Sistematika

Indikator kesejahteraan Kota Bandung tahun 2020 ini terdiri dari 7 kelompok yakni Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Taraf dan Pola konsumsi , serta sosial lainnya yang digambarkan dalam tabel dan gambar/grafik beserta uraiannya yang disajikan secara terpisah dan dalam bab masing masing.

### 1.3 Sumber Data

Sumber data yang disajikan dalam pembuatan publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020 ini yaitu data sekunder hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 dan 2019 dan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019 yang dikumpulkan secara primer oleh petugas BPS.





## 1.4 Konsep dan Definisi

### **Rumah Tangga**

Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama dan makan satu dapur. Yang dimaksud makan satu dapur adalah jika pengurusan makan sehari harinya dikelola menjadi satu.

### **Kepala Rumah Tangga**

Seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk oleh anggota rumah tangga bersangkutan sebagai kepala rumah tangga.

### **Anggota Rumah Tangga**

Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih ,dianggap bukan sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang tinggal di rumah tangga kurang 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

### **Sekolah**

Kegiatan bersekolah di sekolah formal (negeri dan swasta) baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

### **Tidak/belum pernah sekolah**

Mereka yang tidak mau atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak kanak yang tidak melanjutkan ke SD.

### **Masih bersekolah**

Mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.



### **Tidak sekolah lagi**

Mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

### **Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)**

Jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

### **Angka Partisipasi Sekolah**

Proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu ( 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

### **Keluhan Kesehatan**

Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau gangguan kejiwaan, baik karena karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, criminal atau hal lain.

### **Imunisasi**

Memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan kedalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

### **Penduduk Usia Kerja**

Penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

### **Angkatan Kerja**

Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan atau mencari pekerjaan.

### **Penduduk Bukan Angkatan Kerja**

Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.





## **Bekerja**

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja dalam satu jam tersebut harus dilakukan berturut turut tidak terputus.

## **Jenis Pekerjaan**

Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang.

## **Lapangan Pekerjaan**

Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha /perusahaan/ instansi tempat seorang bekerja.

## **Status Pekerjaan**

Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya.

## **Pekerjaan Utama**

Pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak pada referensi waktu survey seminggu yang lalu dan bukan biasanya (*usually*)

## **Penganggur**

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah dapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

## **Mencari Pekerjaan**

Kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

## **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

## **Setengah Penganggur**

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari :



- Setengah penganggur terbuka adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- Setengah penganggur sukarela adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*)

### **Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan**

Jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

### **Luas Lantai**

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

### **Dinding**

Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

### **Atap**

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami dibawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

### **Pengeluaran rata rata per kapita**

Rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah





## *Pendahuluan*

tangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumah tangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata rata sebulan.

<https://bandungkota.bps.go.id>



<https://bandungkota.bps.go.id>





## **BAB II KEPENDUDUKAN**

Penduduk merupakan dasar dan tujuan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan didasarkan dengan kondisi demografi yang ada. Dengan demikian program pembangunan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Kota Bandung Tahun 2018-2023, penduduk adalah titik sentral dalam pembangunan karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan.

Kondisi demografi di sebuah wilayah akan mempengaruhi bagaimana dan sejauh mana pembangunan tersebut dapat dilakukan. Jumlah penduduk merupakan salah satu modal pembangunan karena dengannya pembangunan dapat bergerak. Kondisi demografi lainnya seperti komposisi penduduk, distribusi penduduk, rasio jenis kelamin dan sebagainya akan menentukan program dan kebijakan dasar yang harus diambil dalam proses pembangunan.

Dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan tersebut, diperlukan data kependudukan yang akurat dan terkini. Pembangunan tanpa didasari oleh data membutuhkan biaya yang lebih besar. Keberadaan data kependudukan sangat penting supaya arah pembangunan menjadi jelas dan terarah.

Penduduk yang berkualitas adalah penduduk yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ditandai dengan kondisi ideal dimana jumlah penduduknya terkendali, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dengan layak, memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas.

Informasi kependudukan merupakan data strategis yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Pertumbuhan dan sebaran penduduk serta urbanisasi dan migrasi penduduk di Kota Bandung menjadi permasalahan utama. Dengan adanya informasi strategis ini, diharapkan Pemerintah dapat membuat kebijakan dan program



yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Parameter kependudukan yang akan dibahas pada bab ini adalah jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, sex ratio, persebaran dan kepadatan penduduk, beban ketergantungan, rata-rata usia perkawinan pertama, dan penggunaan alat/cara KB.

### 2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2019 adalah sebesar 2.507.888 jiwa, terdiri dari 1.263.916 penduduk laki-laki dan 1.243.972 penduduk perempuan. Penduduk Kota Bandung mencakup 5,09 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat. Jumlah penduduk Kota Bandung adalah jumlah penduduk keenam terbesar di Jawa Barat. Sedangkan di wilayah Bandung Raya, Kota Bandung merupakan kota/kabupaten dengan penduduk kedua terbesar setelah Kabupaten Bandung.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandung, 2015-2019 (Jiwa)**

Tahun	Jumlah Penduduk
(1)	(2)
2015	2.481.469
2016	2.490.622
2017	2.497.938
2018	2.503.708
2019	2.507.888

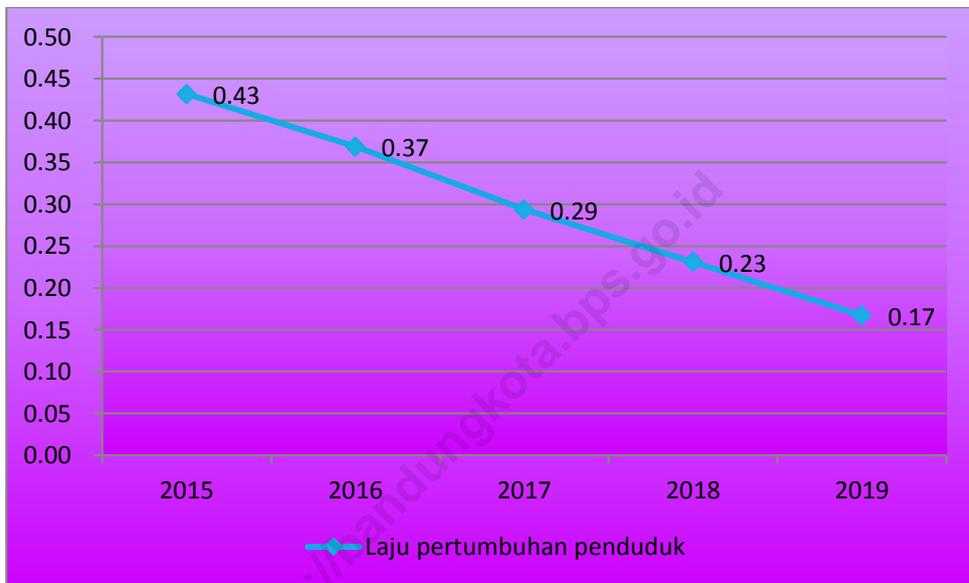
*Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2010-2020, BPS*





Jumlah penduduk Kota Bandung meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 yang sebesar 2.503.708 jiwa maka terdapat penambahan penduduk sebesar 0,17 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung dapat dilihat di Grafik 1.

**Grafik 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung, 2015-2019 (persen)**



Sumber : *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2010-2020, BPS*

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung menunjukkan tren yang terus menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung adalah sebesar 0,43 persen. Tahun 2016 turun menjadi 0,37 persen, dan turun kembali tahun berikutnya menjadi 0,29 persen. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung turun menjadi 0,23 persen dan turun menjadi 0,17 di tahun 2019. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk telah menunjukkan adanya keberhasilan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung sembilan tahun terakhir adalah 0,43 persen per tahun, berada di bawah laju pertumbuhan penduduk per tahun Jawa Barat yang sebesar 1,48 persen per tahun.



## 2.2. Sebaran dan kepadatan penduduk

Secara administratif, Kota Bandung terbagi ke dalam 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Bandung adalah Kecamatan Babakan Ciparay, yaitu mencakup 6.12 persen penduduk Kota Bandung. Empat kecamatan lainnya dengan jumlah penduduk terbesar adalah Bandung Kulon, Kecamatan Coblong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Bojongloa Kaler. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Cinambo di mana penduduknya mencakup 1,11 persen penduduk Kota Bandung.

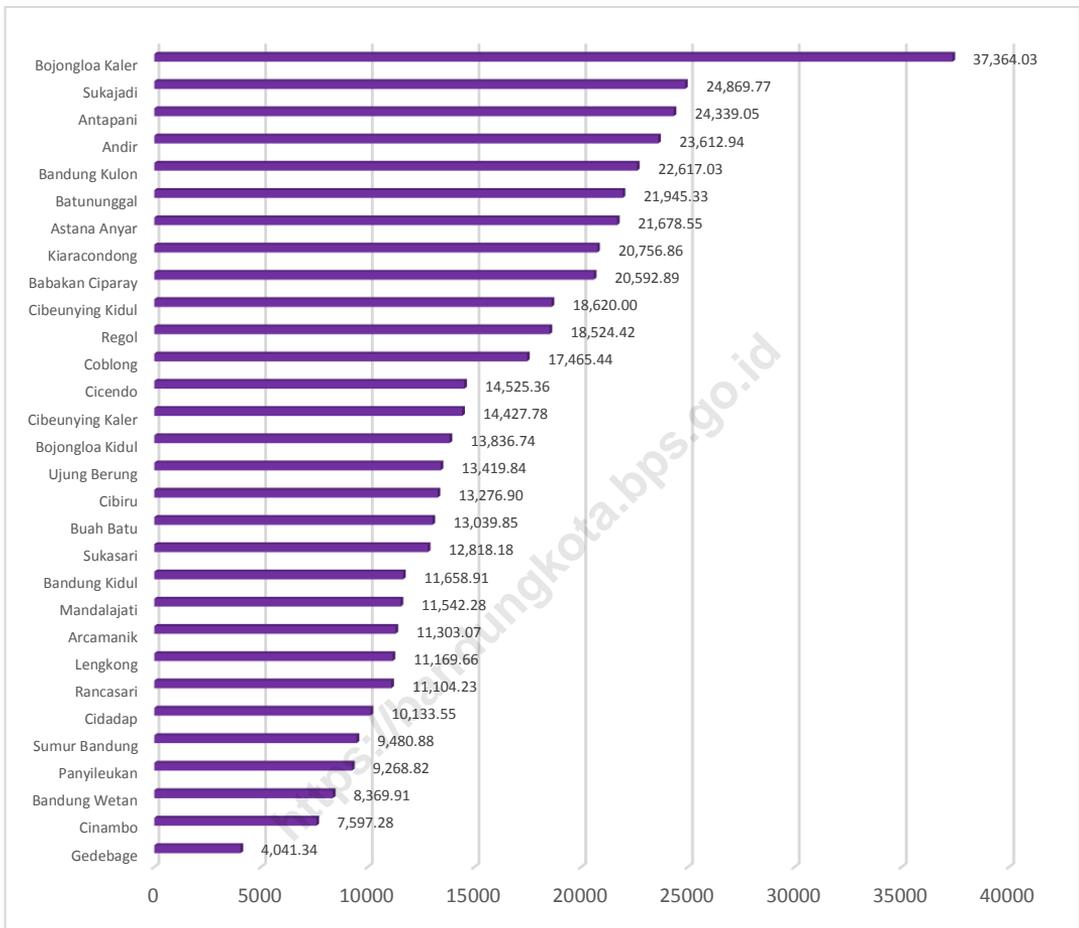
Kepadatan penduduk Kota Bandung tahun 2019 mencapai 14.989,47 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 37.364,03 penduduk per km<sup>2</sup>. Empat kecamatan lain dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Antapani, Kecamatan Andir, dan Kecamatan Bandung Kulon. Hanya lima kecamatan di Kota Bandung yang memiliki tingkat kepadatan penduduk di bawah 10.000 penduduk per km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Panyileukan, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan Gedebage. Kepadatan penduduk terkecil ada di kecamatan Gedebage dengan kepadatan 4.041,34 penduduk per km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk yang menghuni suatu daerah akan turut menentukan program pembangunan. Semakin besar jumlah penduduk yang berada di suatu wilayah maka akan semakin besar pula sarana pendukung yang diperlukan. Dengan luas wilayah yang relatif tidak terlalu besar, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kota Bandung menunjukkan adanya jumlah penduduk yang cukup besar yang tinggal dalam suatu wilayah yang relatif kecil. Kebutuhan sarana perumahan, kesehatan, kebersihan dan sarana umum lainnya di daerah ini akan besar.





Grafik 2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bandung, 2019 (jiwa/km<sup>2</sup>)



Sumber : Proyeksi Data Penduduk BPS

### 2.3. Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

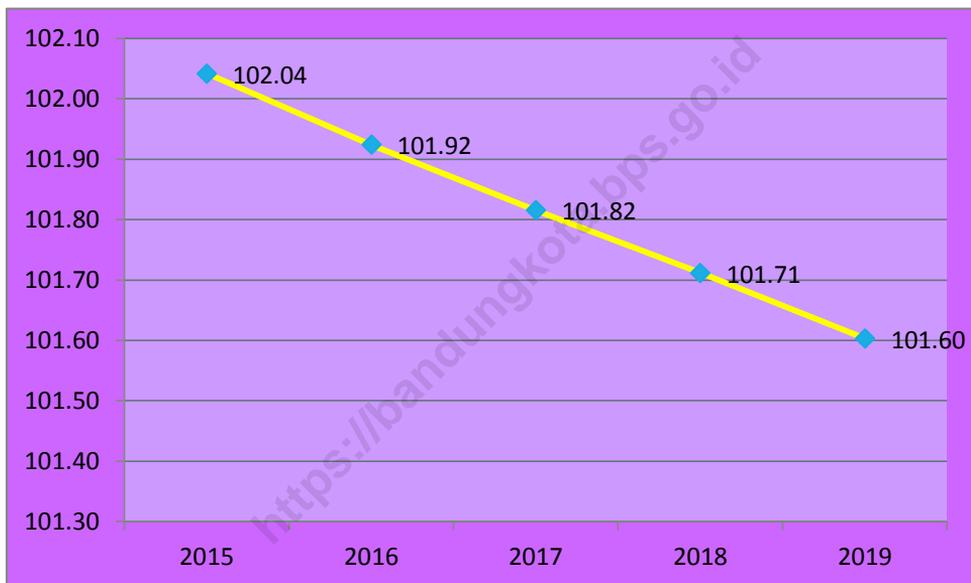
Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Pada tahun 2019, rasio jenis kelamin Kota Bandung adalah sebesar 101,60 dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1,26 juta dan perempuan sebanyak 1,24 juta jiwa. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

## Kependudukan



Ratio jenis kelamin sebesar 101,60 menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan di Kota Bandung, maka terdapat sekitar 101 jiwa penduduk laki-laki. Angka tersebut terus menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir. Dari grafik 3 terlihat bahwa pada tahun 2015 rasio jenis kelamin Kota Bandung adalah 102,04 dan terus menurun hingga di tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan semakin seimbang dalam waktu lima tahun terakhir.

**Grafik 3 Rasio Jenis Kelamin Kota Bandung, 2015-2019 (persen)**



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2015-2019, BPS

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas).

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang



ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Angka Beban Ketergantungan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2. Angka Beban Ketergantungan Kota Bandung, 2018-2019 (persen)**

Kelompok Umur	2018	2019
(1)	(2)	(3)
0-14	561.805	556.614
15-64	1.810.049	1.813.815
65+	131.854	137.459
Angka Beban Ketergantungan	38,32	38,27

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2017-2019, BPS

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Penduduk Kota Bandung di tahun 2019 didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini dapat dilihat dari angka beban ketergantungan Kota Bandung pada Tahun 2018 sebesar 39,32 dan turun pada tahun 2019 menjadi 38,27. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 38 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah.



Potensi penduduk usia produktif yang cukup besar dapat dioptimalkan agar dapat menjadi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, tidak mungkin dapat menyebabkan timbulnya beragam permasalahan penduduk seperti tingginya pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan pemukiman kumuh. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih produktif, cerdas dan berkarakter sehat yang dapat menjadi modal pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.4. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 berbunyi, jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali.

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama idealnya adalah umur 21 hingga 25 tahun. Rekomendasi BKKBN sesuai dengan hak pendidikan 12 tahun, juga diharapkan ketika menikah sudah memiliki kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi serta kemapanaan material dan mencegah meningkatnya pernikahan anak.

Usia perkawinan pertama dapat menjadi salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya.





Tabel 3. Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin di Kota Bandung, 2019 (persen)

Umur	Persentase
(1)	(2)
<= 16	8,89
17 – 18	15,67
19 -20	21,76
21+	53,68
Total	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, 2019

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, sebagian perempuan di Kota Bandung melakukan perkawinan pertama pada umur di atas 21 tahun. Hal ini sejalan dengan persentase pendidikan perempuan di Kota Bandung di mana 53,96 persen berpendidikan SMA ke atas. Dengan demikian secara umum, perempuan Kota Bandung telah memenuhi rekomendasi BKKBN dalam memenuhi usia perkawinan. Selebihnya terbagi ke dalam beberapa kelompok. Sebanyak 21,76 persen perempuan pernah kawin di Kota Bandung kawin pertama di usia 19 – 20 tahun. Terdapat pula perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17 -18 tahun dengan persentase sebesar 15,67 persen. Bahkan masih terdapat perkawinan yang dilakukan di usia perempuan kurang dari 16 tahun sebesar 8,89 persen.

Perkawinan perempuan dibawah umur masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Banyak dampak buruk dari terjadinya pernikahan anak. Selain dampak psikologis dari seseorang yang belum dewasa dan siap untuk menikah, dapat menyebabkan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, angka kematian ibu dan anak dapat meningkat seiring terjadinya kehamilan di usia muda dan minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi.



## 2.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Terdapat berbagai macam jenis alat/cara KB. Menurut masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu alat kontrasepsi hormonal dan permanen. Alat kontrasepsi hormonal umumnya mengandung kombinasi progestrin dan estrogen, atau progesteron saja. Alat kontrasepsi yang dapat digunakan dalam bentuk pil KB, suntik KB, implan, *Intra Uterine Device* (IUD), kondom dan lainnya. Biasanya digunakan untuk menunda dan mengatur jarak kehamilan yang memiliki masa kerja bersifat sementara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kontrasepsi permanen atau sterilisasi biasanya digunakan untuk perempuan yang tidak lagi menginginkan kehamilan karena faktor kesehatan, usia atau jumlah anak yang telah dilahirkan. Biasanya digunakan alat kontrasepsi seperti tubektomi/MOW, ligasi tuba, implan tuba, dan elektrokoagulasi tuba, sedangkan pada lelaki dapat dilakukan vasektomi/MOP.

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun di Kota Bandung berstatus sedang menggunakan alat/cara KB adalah sebesar 52,26 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Kota Bandung telah mengikuti himbauan pemerintah dan merasakan pentingnya untuk mengatur kelahiran. Kondisi perempuan yang berstatus pernah kawin dan tidak menggunakan alat/cara KB dimungkinkan karena berstatus perkawinan cerai, sedang dalam kondisi hamil, sedang berprogram untuk memiliki anak atau pun mengalami keluhan dengan alat KB.



**Tabel 4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kota Bandung, 2019 (persen)**

Penggunaan Alat/Cara KB	Persentase
(1)	(2)
Pernah Menggunakan	11,77
Sedang Menggunakan	52,26
Tidak Menggunakan	35,97
Jumlah	100

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2019*

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bandung, terdapat 361.390 pasangan usia subur di Kota Bandung tahun 2019 dengan 272.224 peserta KB aktif. Suntikan merupakan alat KB yang paling banyak digunakan oleh peserta KB di Kota Bandung yaitu sebesar 41,96 persen. Selanjutnya adalah IUD yang digunakan oleh 33,57 persen peserta KB di Kota Bandung. Alat KB ketiga terbanyak yang digunakan oleh peserta KB di Kota Bandung adalah pil yakni digunakan oleh 15,31 persen peserta KB.

Pelaksanaan program KB merupakan sebuah salah satu cara pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga nantinya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Program KB mengatur jarak kelahiran yang memungkinkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian orang tua dapat lebih mempersiapkan dirinya dalam memiliki anak sehingga diharapkan anak akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih berkualitas dan menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, tangguh dan berkualitas.



<https://bandungkota.bps.go.id>



## BAB III KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek dalam kesejahteraan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dan ekonomis. Kesehatan sangat berkaitan dengan aktifitas manusia. Suatu kegiatan akan lebih berkualitas bila dilakukan dalam kondisi yang sehat.

Aspek kesehatan tercakup pula dalam tujuan ketiga dalam *The 2030 for the Sustainable Development Goals* atau Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Tujuan nomer tiga tersebut adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Dengan demikian negara yang menyepakati SDGs sebagai salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan bersepakat bahwa aspek kesehatan memerlukan perhatian dan penanganan yang baik.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap daerah membuat program dan strategi. Dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah 1) Meningkatkan kualitas lingkungan sehat, 2) Meningkatkan budaya hidup sehat; dan 3) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat

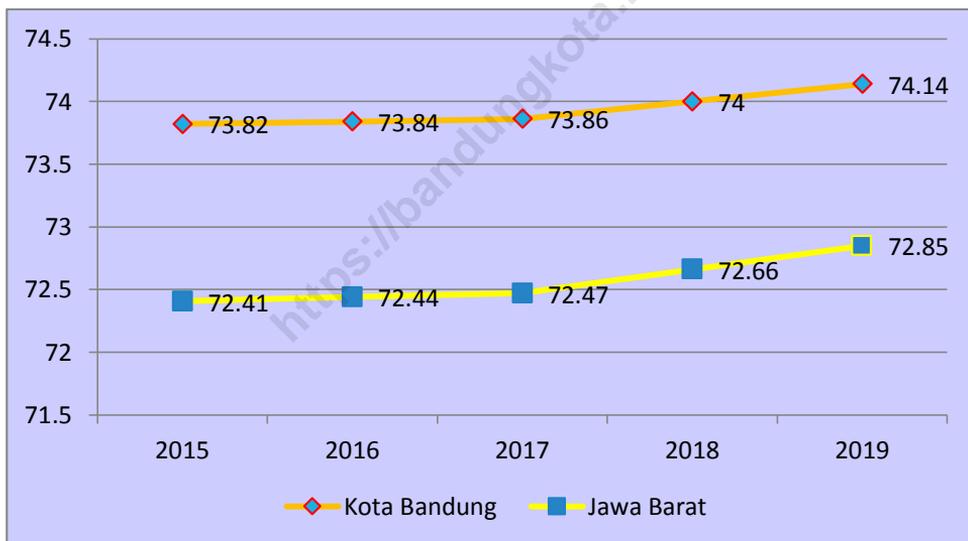


jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

### 3.1. Derajat dan Status Kesehatan

Salah satu parameter untuk mengukur derajat kesehatan suatu wilayah adalah Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi UHH berarti semakin rendah angka kematian. UHH digunakan sebagai indikator derajat kesehatan penduduk dan kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, dan kesehatan lingkungan yang baik.

**Grafik 4. Umur Harapan Hidup Saat Lahir di Kota Bandung dan Jawa Barat, 2015-2019 (Tahun)**



Sumber : [jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id)

UHH Kota Bandung tahun 2019 mencapai 74,14 tahun, naik 0,14 tahun dari tahun 2018. Kota Bandung mengalami kenaikan UHH setiap tahunnya. Dalam waktu lima tahun terakhir UHH Kota Bandung telah meningkat 0,32 tahun. Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, maka UHH Kota Bandung berada di atas UHH Jawa Barat. Pada tahun 2019 UHH Jawa Barat mencapai 72,85 tahun, lebih rendah 1,29 tahun dengan UHH Kota Bandung.



Peningkatan angka usia harapan hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tingkat Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Selama tiga tahun terakhir rata-rata angka kesakitan penduduk Kota Bandung adalah 14,30 persen. Ini berarti terdapat 14,30 persen penduduk Kota Bandung yang menderita sakit sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Seperti dilihat di grafik 5, angka kesakitan Kota Bandung tahun 2019 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2018, yaitu 14,13 persen di tahun 2019 dan 13,41 persen di tahun 2018. Namun demikian angka kesakitan penduduk Kota Bandung tahun 2019 lebih rendah dari angka kesakitan tahun 2017 yang sebesar 15,37 persen.



**Grafik 5. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2017-2019 (Persen)**



*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2017-2019*

Bila ditinjau dari kelompok pengeluaran penduduk Kota Bandung, tidak telalu terdapat perbedaan yang berarti dari kesakitan yang diderita oleh setiap kelompok pendapatan yang berarti. Angka kesakitan berdasarkan kelompok pengeluaran dapat dilihat di tabel 5.

**Tabel 5. Angka Kesakitan Berdasarkan kelompok Pengeluaran di Kota Bandung 2017-2019**

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
40 persen terbawah	14,87	14,18	13,05
40 persen tengah	16,92	14,37	15,51
20 persen atas	13,3	9,94	13,52
Kota Bandung	15,37	13,41	14,13

*Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2017-2019*





Penduduk di kelompok pengeluaran 40 tengah memiliki angka kesakitan lebih tinggi dibanding dua kelompok lainnya. Dalam tiga tahun terakhir, angka kesakitan di kelompok tersebut berada di atas angka kesakitan Kota Bandung. Angka kesakitan kelompok pengeluaran 40 persen tengah naik tipis dibanding tahun sebelumnya, yaitu 14,37 di tahun 2018 menjadi 15,51 di tahun 2019.

Sedangkan angka kesakitan penduduk yang berada dikelompok pengeluaran 20 persen teratas menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan angka kesakitan Kota Bandung. Di tahun 2017 dan 2018, angka kesakitan kelompok tersebut juga merupakan angka kesakitan yang paling rendah dibandingkan dengan dua kelompok pengeluaran lainnya. Hal yang berbeda ditunjukkan pada tahun 2019, di mana angka kesakitan di kelompok 20 persen teratas merupakan angka kesakitan kedua terkecil, tidak berbeda jauh dengan angka kesakitan di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Angka kesakitan di kelompok ini naik cukup besar dibandingkan dengan angka kesakitan di tahun 2018.

Angka kesakitan penduduk di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019, angka kesakitan penduduk kelompok ini pun berada di bawah angka kesakitan kota Bandung, di mana tahun sebelumnya berada di atas angka kesakitan Kota Bandung.

### 3.2. Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Undang-undang Kesehatan, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Dari Kota Bandung Dalam Angka 2020, diketahui Kota Bandung memiliki sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, di antaranya 26 rumah sakit, 10 rumah sakit bersalin, 108

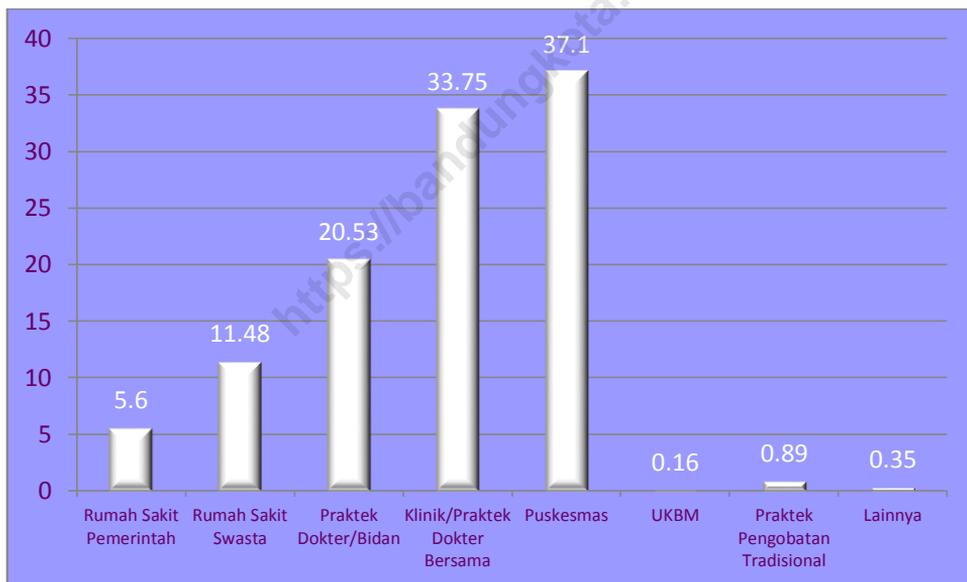
## Kesehatan



poliklinik, 69 puskesmas, 9 puskesmas pembantu, dan 129 apotek. Selain itu terdapat pula posyandu, praktek bidan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandung.

Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan membantu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan untuk mendapatkan bantuan medis. Dari data Susenas 2019 diketahui bahwa 37,10 persen penduduk Kota Bandung yang mengalami keluhan kesehatan mengunjungi puskesmas untuk berobat jalan. Klinik atau praktek dokter bersama dikunjungi oleh 33,75 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Sedangkan rumah sakit pemerintah hanya dikunjungi oleh 5,6 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

**Grafik 6. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan di Kota Bandung 2019 (Persen)**



**Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2019**

Namun demikian tidak semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan mengunjungi sarana kesehatan untuk berobat jalan. Dari hasil Susenas 2019, hanya 48,76 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Untuk penduduk perkotaan, 62,77 persen



penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak berobat jalan memilih untuk mengobati sendiri. Sebagian lagi, yaitu 33,10 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan merasa tidak perlu berobat jalan. Namun perlu dicermati bahwa terdapat 1,41 persen penduduk perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan disebabkan karena tidak punya biaya berobat. Hal ini membutuhkan monitoring yang berkala untuk membantu masyarakat dengan kesulitan finansial dalam mengakses fasilitas kesehatan sehingga pada akhirnya nanti seluruh masyarakat dapat berobat tanpa kecuali.

### 3.3. Kesehatan Ibu dan Balita

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan balita merupakan salah satu target dalam SDGs di sektor kesehatan. Diharapkan pada tahun 2030, dapat mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kematian hidup. Juga diharapkan pada tahun 2030 dapat mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita per 25 per 1.000.<sup>1</sup>

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup (*Profil Kesehatan Indonesia 2018*)

Upaya untuk menurunkan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas dan pemahaman mengenai kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi,

---

<sup>1</sup> Target 3.1 dan 3.2 dari SDGs



perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan terampil dalam membantu proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase tenaga penolong dan fasilitas tempat persalinan yang digunakan. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan mampu memperluas akses, meningkatkan sarana prasarana pelayanan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan kesehatan.

**Tabel 6. Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kota Bandung, 2017 – 2019 (Persen)**

Penolong Persalinan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tenaga Kesehatan</b>			
Dokter Kandungan	42,37	45,21	35,90
Dokter Umum	0,00	1,22	1,69
Bidan	54,79	52,56	62,41
Perawat	1,16	1,02	0,00
Tenaga Paramedis Lainnya	1,68	0,00	0,00
<b>Bukan Tenaga Kesehatan</b>			
Dukun Bersalin	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2017 - 2019



Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar wanita usia 15-49 yang melahirkan di Kota Bandung ditolong oleh Bidan dalam menangani proses kelahiran terakhirnya. Persentase bidan sebagai penolong proses kelahiran terakhir mencapai 62,41 persen, disusul dokter kandungan sebesar 35,90 persen dan dokter umum sebesar 1,69 medis. Penanganan kelahiran di Kota Bandung tahun 2019 sepenuhnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tidak ada pemanfaatan dukun bersalin dan tenaga lainnya yang bukan tenaga kesehatan dalam menolong proses kelahiran di Kota Bandung.

Sedangkan jika dilihat dari tempat melahirkannya, persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

**Tabel 7. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Yang Pernah Melahirkan Dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Terakhir di Kota Bandung, 2017-2019 (Persen)**

Tempat Melahirkan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit/RSIA	41,03	42,19	36,57
RS bersalin/Klinik	34,48	30,74	44,16
Puskesmas/Pustu	22,38	22,60	17,00
Rumah	2,11	2,74	2,27
Lainnya	0	1,73	0
Jumlah	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2017 - 2019*

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa 44,16 persen masyarakat memilih melahirkan di RS Bersalin/Klinik, 36,57 persen melahirkan rumah sakit/RSIA, 17 persen melahirkan di puskesmas atau pustu, dan 2,27 persen melahirkan di rumah.

Kesehatan bayi yang baru dilahirkan juga merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu parameter yang diukur pada saat bayi baru lahir adalah berat badan. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2,5 kg dianggap beresiko



mengalami gangguan kesehatan yang nantinya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Dari data SUSENAS 2019 diketahui bahwa 82,22 persen berat anak lahir hidup di Kota Bandung di atas 2,5 kg. Artinya masih terdapat 17,78 persen bayi yang dilahirkan dengan berat lahir di bawah 2,5 kg. Berat bayi lahir yang kurang dari 2,5 kg dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, di antaranya gangguan kesehatan saat ibu hamil, kekurangan asupan nutrisi baik bagi ibu ataupun bayi saat proses kehamilan, ataupun terdapat gangguan kesehatan pada ibu hamil. Untuk itu diperlukan pemeriksaan yang rutin dan berkualitas selama proses kehamilan.

Untuk menjaga kesehatan bayi dan balita, pemerintah memiliki program imunisasi yang terjadwal. Imunisasi dilakukan untuk meningkatkan ketahanan tubuh pada anak hingga terhindar dari penyakit yang berbahaya. Pada tahun 2019, di Kota Bandung tercatat 55,36 persen balita telah mendapat imunisasi lengkap. Dari data Susenas diketahui bahwa 97,70 persen balita di Kota Bandung telah mendapat imunisasi BCG dan 91,40 persen telah mendapat imunisasi DPT. Cakupan imunisasi polio dan campak telah mencapai 92,80 persen dan 68,98 persen balita. Sedangkan imunisasi Hepatitis B telah diterima oleh 88,30 persen balita di Kota Bandung pada tahun 2019.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang terampil dan terakreditasi serta fasilitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga upaya penguatan kesehatan dasar yang berkualitas melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dapat terwujud.



## BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendidikan merupakan hak dasar warga negara Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Di pasal lain, yaitu pasal 28C, ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong



tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

### 4.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan sendiri menurut data IPM Indonesia yang dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP) pada 2 November 2011 memberikan kontribusi sebanyak 0,58. Oleh karena itu sektor pendidikan memegang peranan penting dalam penghitungan IPM (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/164932>).

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, pemerintah menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-





rata lama sekolah penduduk usia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

Pemerintah telah menggulirkan beberapa program yang berkaitan dengan pendidikan. Program Bantuan Operasional Sekolah adalah salah satu program bantuan dari pemerintah kepada seluruh sekolah yang terdaftar resmi berupa bantuan biaya operasional sekolah. Program lainnya adalah Program Indonesia Pintar, yaitu program pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program tersebut, diharapkan seluruh anak Indonesia dapat bersekolah.

Pada tahun 2019 IPM Kota Bandung mencapai 81,62, naik tipis dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 81,06. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2019 adalah 10,74 tahun. Variabel lama sekolah ini mengalami kenaikan 0,11 tahun dari rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 yang mencapai 10,63 tahun. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung baru mengenyam pendidikan selama 10,74 tahun setara dengan kelas X di jenjang SMA.

**Tabel 8. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) Kota Bandung (Tahun), 2017-2019**

Indikator Pendidikan	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	13,90	14,18	14,19
Rata-rata lama sekolah (MYS)	10,59	10,63	10,74

*Sumber: ipm.bps.go.id*



Demikian pula dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun. Pada tahun 2019, Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung mencapai 14,19 tahun, naik 0,01 tahun dari tahun 2018 yang sebesar 14,18. Ini berarti, pada tahun 2019 penduduk usia 7 tahun di Kota Bandung diharapkan dapat bersekolah selama 14,19 tahun.

**Tabel 9. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) (Tahun), Kota Bandung 2017 - 2019**

Indikator Pendidikan	Kota Bandung			Jawa Barat		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Lama Sekolah	13,90	14,18	14,19	12,42	12,45	12,48
Rata-rata lama sekolah	10,59	10,63	10,74	8,14	8,15	8,37

Sumber: [ipm.bps.go.id](http://ipm.bps.go.id)

Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kota Bandung berada di atas rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Barat. Terdapat selisih 1,71 tahun untuk angka harapan lama sekolah, dan 2,37 tahun untuk komponen rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2019 Angka Harapan Lama Sekolah Jawa Barat adalah 12,48 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Barat adalah 8,37 tahun. Perbedaan ini tentu tidak lepas dari ketersediaan sarana pendidikan di Kota Bandung yang lebih lengkap dibandingkan dengan kota/kabupaten di Jawa Barat.



Grafik 7. Rata-rata Lama Sekolah, Kota Bandung 2017-2019 (Tahun)



Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

Harapan lama sekolah Kota Bandung merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi di Jawa Barat. Sedangkan rata-rata lama sekolah Kota Bandung merupakan rata-rata lama sekolah tertinggi ketiga setelah Kota Bekasi (11,10), Kota Depok (11 tahun) dan Kota Cimahi (10,95 tahun). Namun demikian, angka ini perlu terus ditingkatkan hingga penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan 12 tahun sebagaimana direncanakan oleh pemerintah.



**Grafik 8. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bandung dan Jawa Barat, Tahun 2017-2019 (Tahun)**



Sumber: [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id)

#### 4.2. Partisipasi Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.

**Tabel 10. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, Kota Bandung 2019**

Karakteristik	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-laki	0,00	30,79	12,32	28,85	28,04	100
Perempuan	0,00	28,42	11,39	31,52	28,57	100
<b>Kelompok Pengeluaran</b>						
40 persen terbawah	0,00	36,10	13,76	20,25	29,88	100
40 persen tengah	0,00	26,94	11,57	31,09	30,39	100
20 persen teratas	0,00	21,13	8,38	49,55	20,93	100
Kota Bandung	0,00	26,93	11,86	30,16	28,35	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh penduduk yang berusia 7-24 tahun telah bersekolah. Status masih bersekolah memiliki persentase yang berbeda di setiap jenjangnya dengan rata-rata persentase untuk yang bersekolah di jenjang SD/ sederajat 26,93 persen, SMP/ sederajat 11,86 persen, SMA ke atas 30,16 persen. Sedangkan persentase untuk penduduk yang tidak bersekolah lagi adalah 28,35 persen.

Bila ditinjau dari segi kelompok pengeluaran, penduduk berumur 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah memiliki kecenderungan untuk menurun partisipasi sekolahnya. Dari tabel di atas, penduduk dengan karakteristik tersebut 36,10 persen masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat, 13,76 persen masih bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, 20,25 persen masih bersekolah di jenjang SMA ke atas. Sedangkan untuk penduduk yang tidak bersekolah lagi adalah sebesar 29,88 persen.

Sedangkan untuk penduduk 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 40 persen tengah 26,94 persen di antaranya masih sekolah di jenjang SD/ sederajat. 11,57 persen sedang bersekolah di jenjang SMP/ sederajat, 31,09 persen sedang bersekolah di jenjang SMA ke atas. Sisanya, yaitu 30,29 persen berstatus tidak bersekolah lagi.



Penduduk usia 7-24 tahun dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang berstatus masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat adalah sebesar 21,13 persen, jenjang SMP/ sederajat sebesar 8,38 persen, dan SMA/ sederajat 49,55 persen.

Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SD/ sederajat berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Sedangkan persentase terkecil nya berasal dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Demikian pula untuk jenjang SMP/ sederajat. Sedangkan untuk jenjang SMA/ sederajat berlaku sebaliknya. Persentase terbesar penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di jenjang SMA ke atas berasal dari penduduk dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas.

Sedangkan persentase terbesar untuk status tidak bersekolah lagi berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen tengah. Besar persentase tersebut tidak berbeda jauh dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Besaran persentase kedua kelompok tersebut lebih besar dari persentase status tidak bersekolah lagi Kota Bandung. Kelompok pengeluaran 20 persen teratas merupakan kelompok yang terkecil persentasenya di status tidak bersekolah lagi.

Perbedaan partisipasi sekolah dilihat dari kelompok pengeluaran menyiratkan masih adanya kesenjangan akses sekolah di masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh biaya sekolah di mana di jenjang SMA ke atas masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pendidikan. Akibatnya masyarakat dengan pengeluaran yang lebih kecil cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat dengan pengeluaran besar. Perbedaan ini akan menyebabkan penduduk yang tidak bersekolah lagi, baik karena bekerja, menikah, menganggur, sebagian besar berpendidikan rendah.

### 4.3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran dalam kesejahteraan. Secara umum tingkat pendidikan turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi



tingkat pendidikan seseorang maka semakin luas pula pengetahuan dan keterampilannya. Dengan demikian akan dihasilkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

**Tabel 11. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tertinggi, Kota Bandung 2019 (Persen)**

Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	2,63	4,55	3,58
SD/MI	16,02	18,96	17,49
SMP/Mts	20,84	22,53	21,68
SMA/SMK/MA	43,75	36,83	40,31
Diploma I dan Diploma II	0,89	1,15	1,02
Akademi/Diploma III	3,10	3,82	3,46
Diploma IV s.d S3	12,77	12,16	12,47

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat JawaBarat 2019

Pada tahun 2019 terdapat 40,31 persen penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Bandung berijazah tertinggi SMA/SMK/MA. Pendidikan tertinggi kedua terbanyak yang ditamatkan oleh penduduk usia di atas 15 tahun di Kota Bandung adalah SMP/Mts disusul oleh SD/MI di tempat ketiga. Ijazah pendidikan di atas jenjang SMA dimiliki oleh 16,95 persen penduduk Kota Bandung. Pada tahun 2019, terdapat pula 3,58 persen penduduk kota Bandung yang berusia di atas 15 tahun yang tidak mempunyai ijazah pendidikan sama sekali.

Ijazah tertinggi di tingkat SD/MI, SMP/MTs untuk penduduk perempuan di atas 15 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun untuk jenjang SMA, penduduk laki-laki di atas 15 tahun memiliki persentase lebih besar dalam kepemilikan ijazah dibandingkan penduduk perempuan di kategori usia yang sama. Sedangkan untuk kepemilikan ijazah pendidikan di atas SMA, persentase penduduk perempuan lebih tinggi

## Pendidikan



yaitu 17,13 persen, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 16,76 persen. Untuk katagori tidak memiliki ijazah, penduduk perempuan pun lebih besar persentasenya, yaitu 4,55 persen sedangkan persentase penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah adalah 2,63 persen.

**Tabel 12. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki dan Kelompok Pengeluaran, Kota Bandung 2019 (Persen)**

Kelompok Pengeluaran	Tidak punya ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>40 persen terbawah</b>	4,55	26,92	29,02	39,51
<b>40 persen tengah</b>	3,61	15,20	20,31	60,88
<b>20 persen teratas</b>	1,97	6,28	12,22	79,53
<b>Kota Bandung</b>	3,58	17,49	21,68	57,25

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019

Ditinjau dari sisi pengeluaran, persentase terbesar penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berasal dari kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Demikian pula untuk kepemilikan ijazah tertinggi di jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Namun pada kepemilikan ijazah di jenjang SMA ke atas, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah merupakan kelompok yang paling sedikit memilikinya. Kelompok 20 persen teratas merupakan kelompok yang memiliki persentase terbesar yang memiliki ijazah SMA ke atas.

Gambaran di atas masih menunjukkan adanya kendala dalam menjalani proses pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi (kemiskinan) yang ditunjukkan oleh perbedaan persentase lulusan pada kel

ompok pengeluaran. Selain itu, di samping faktor ekonomi, faktor persepsi masyarakat yang merasakan bahwa pendidikan bukan hal yang penting turut menghambat partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang merata dan





mudah dijangkau masyarakat serta memberikan penyelenggaraan pendidikan yang layak dari segala sisi di seluruh wilayah Kota Bandung mulai dari pusat Kota Bandung sampai wilayah pelosok Kota Bandung.

<https://bandungkota.bps.go.id>



## BAB V KETENAGAKERJAAN

Salah satu misi Pemerintah Kota Bandung seperti yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 adalah membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Salah satu sasaran dalam pembangunan Kota Bandung adalah meningkatkan kesempatan kerja.

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah pembangunan di Kota Bandung. Jumlah angkatan kerja yang besar di Kota Bandung belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga menciptakan pengangguran. Masalah pengangguran yang tidak tertangani dengan baik akan menimbulkan masalah sosial yang lain.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus 2019. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.





## 5.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Jumlah angkatan kerja merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha atau mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Indikator untuk mengukur pengangguran biasanya disebut sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Bandung pada bulan Agustus 2019 sebanyak 1.952.633 orang, bertambah 9.237 orang dibanding Agustus 2018. Sedangkan penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran pada bulan Agustus 2019 adalah sebanyak 1.288.260 orang.

Sebesar 91,84 persen angkatan kerja di Kota Bandung melakukan aktivitas bekerja. Bekerja di sini berarti melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama satu



jam tidak terputus seminggu yang lalu, juga termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga yang membantu suatu kegiatan atau usaha ekonomi.

**Tabel 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung, 2017-2019 (persen)**

Tahun	TPAK	TPT
(1)	(2)	(3)
<b>2017</b>	63,11	8,44
<b>2018</b>	61,98	8,01
<b>2019</b>	65,98	8,16

Sumber: Bandung Dalam Angka 2017-2019

TPAK Agustus 2019 Kota Bandung sebesar 65,98 persen. Artinya sebesar 65,98 persen penduduk Kota Bandung merupakan angkatan kerja dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia kerja. Dalam tiga tahun terakhir, TPAK Kota Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kota Bandung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 angkatan kerja di Kota Bandung meningkat sebesar 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

TPT Agustus 2019 Kota Bandung sebesar 8,16 persen, naik 0,15 persen dibanding tahun 2018 yang sebesar 8,01 persen. Ini berarti 8,16 persen angkatan kerja Kota Bandung dalam keadaan tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran adalah 105.067 orang. Jika dibanding tahun 2018 maka jumlah pengangguran di Kota Bandung tahun 2019 bertambah 8.602 orang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2019, TPAK laki-laki sebesar 80,90 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 50,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam aktivitas bekerja atau usaha ekonomi, sedangkan partisipasi perempuan masih sangat rendah dalam kegiatan ekonomi.





TPAK penduduk laki-laki di Kota Bandung tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 78,23 persen, dan merupakan TPAK paling tinggi dalam tiga tahun terakhir. Demikian pula dengan TPAK penduduk perempuan di Kota Bandung tahun 2019, meningkat 5,36 persen dibanding tahun 2018 yang 45,57 persen. Dalam tiga tahun terakhir TPAK penduduk perempuan di Kota Bandung meningkat setiap tahunnya.

**Grafik 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2017-2019 (persen)**



*Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2017-2019*

Sedangkan menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. TPT laki-laki Kota Bandung tahun 2019 sebesar 6,88 persen, turun 0,28 poin dari 7,16 persen di tahun 2018. TPT penduduk laki-laki 2019 merupakan TPT terendah dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan dalam waktu yang sama, TPT penduduk perempuan Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya. TPT penduduk perempuan Kota Bandung tahun 2019 sebesar 10,19 persen naik 0,06 poin dari 9,49 persen di tahun 2018 dan merupakan TPT tertinggi dalam tiga tahun terakhir.



**Grafik 10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 2017-2019**



*Sumber: Kota Bandung Dalam Angka 2017-2019*

Peningkatan tingkat pengangguran di Kota Bandung menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di Kota Bandung belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan di sisi lain, jumlah angkatan kerja selalu meningkat, baik laki-laki dan perempuan setiap tahunnya. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja cenderung meningkat setiap tahun.

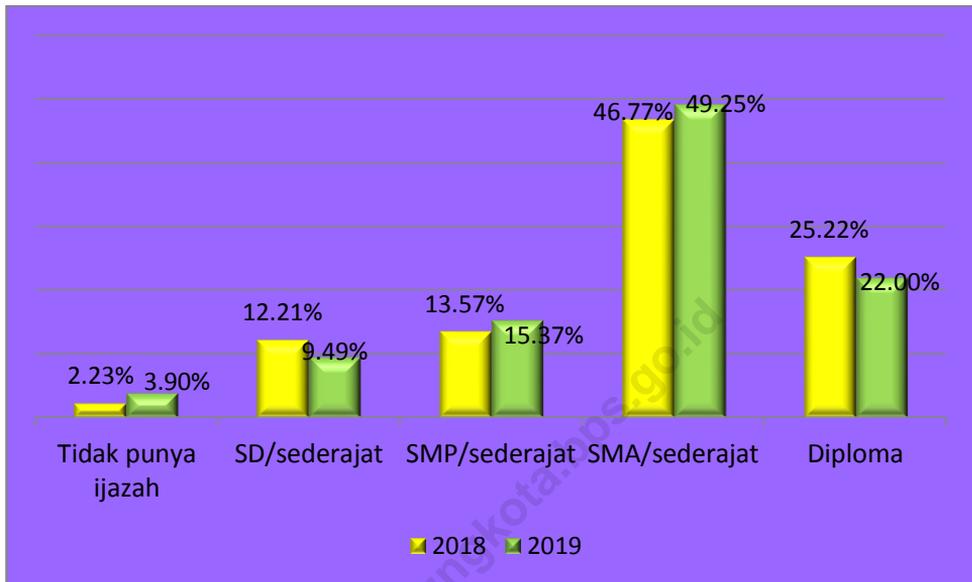
## 5.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan disebutkan sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan pendidikan diharapkan dapat mendapat pekerjaan yang lebih baik. Namun bila jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada, maka akan terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja yang tidak bekerja maka akan menjadi pengangguran.





**Grafik 11. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Bandung 2019 (persen)**



*Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2019*

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk pengangguran terbuka adalah berpendidikan tertinggi SMA/SMK sederajat. Selanjutnya yang merupakan kedua terbanyak adalah penduduk dengan pendidikan Diploma/Universitas. Hal ini tidak terlepas dari jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SMA/ sederajat dan diploma/universitas yang merupakan jumlah angkatan kerja terbanyak. Namun lapangan kerja yang ada lebih sedikit dari jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Jika dibandingkan dengan kondisi 2018, persentase pengangguran terbuka yang berpendidikan SMA/ sederajat mengalami sedikit kenaikan, yaitu 46,77 persen di tahun 2018 menjadi 49,25 persen di tahun 2019. Sedangkan pengangguran terbuka yang berpendidikan diploma/universitas menurun 3,23 persen dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.



Untuk pengangguran terbuka dengan pendidikan di bawah SLTA mengalami kondisi yang berbeda-beda. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang berstatus pengangguran terbuka dan berpendidikan SMP/ sederajat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu 13,57 persen di tahun 2018 menjadi 15,37 persen di tahun 2019. Pengangguran terbuka dengan pendidikan tertinggi SD/sederajat mengalami penurunan dari 12,21 persen di tahun 2018 menjadi 9,49 persen di tahun 2019. Sedangkan untuk pengangguran terbuka yang tidak berijazah mengalami peningkatan dari 2,23 persen di tahun 2018 menjadi 3,90 persen di tahun 2019.

Salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SMA/SMK sederajat dan Diploma/Sarjana disebabkan karena ketimpangan antara jumlah industri yang tersedia di Kota Bandung dengan jumlah lulusan SMK dan jenjang di atasnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan dan membuka lapangan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok ini.

Pembaruan kurikulum pendidikan di semua jenjang diperlukan untuk mengangkat daya serap tenaga kerja di dunia kerja. Lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan diharapkan mampu mengikuti teknologi yang terus berkembang. Selain itu perlu pula pendidikan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha sehingga angkatan kerja yang ada selain dapat masuk ke dalam lapangan kerja namun dapat pula menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat.

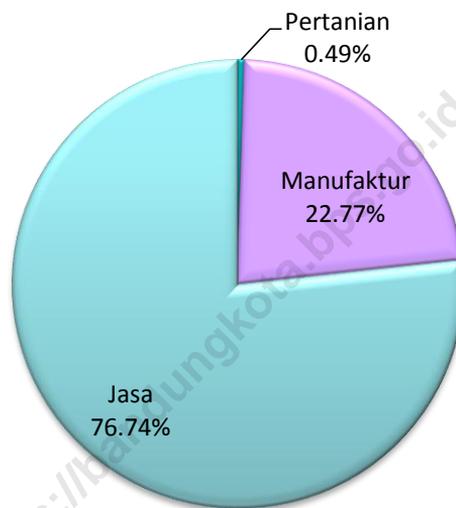




### 5.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufaktur; dan Jasa.

**Grafik 12. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bandung 2019 (persen)**



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2019

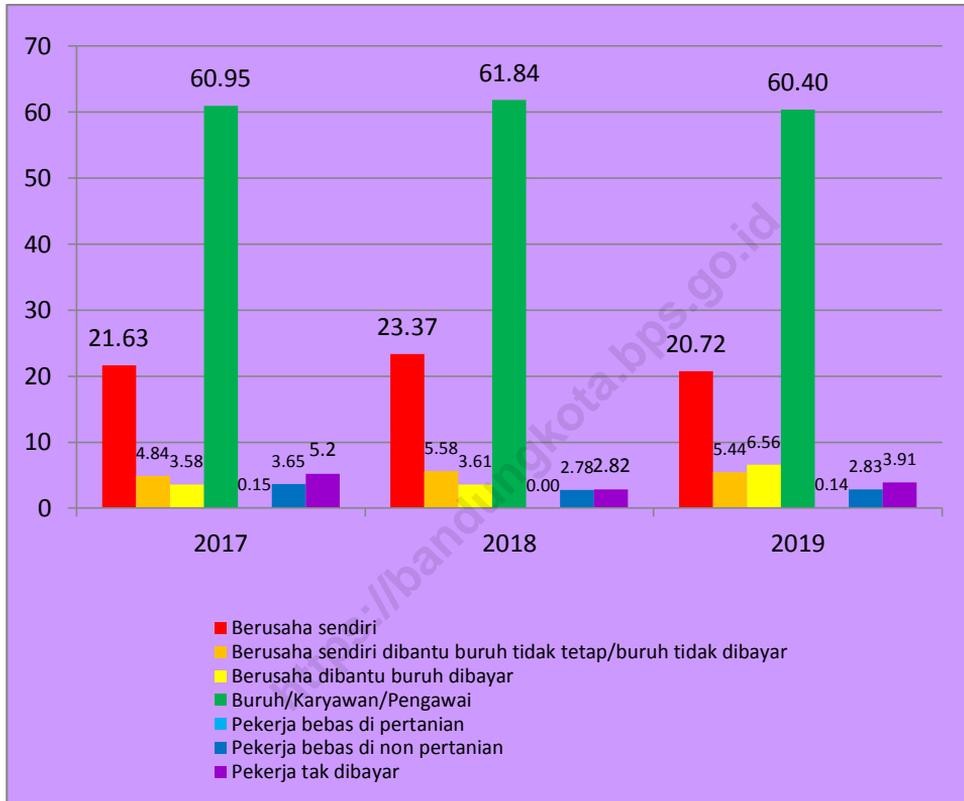
Berdasarkan Grafik 12 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung bekerja di lapangan usaha Jasa. Persentase penduduk Kota Bandung yang berumur 15 tahun yang bekerja seminggu yang lalu di lapangan usaha Jasa mencapai 76,74 persen. Sedangkan lapangan usaha manufaktur menyerap 22,77 persen tenaga kerja di Kota Bandung. Lapangan usaha pertanian yang memang bukan lapangan usaha dominan di Kota Bandung hanya menyerap 0,49 persen angkatan kerja di Kota Bandung.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau



buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

**Grafik 13. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Satus Pekerjaan Utama di Kota Bandung, 2017-2019 (persen)**



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2019

Status buruh/karayanan/pegawai adalah status pekerjaan utama yang paling banyak dimiliki oleh penduduk Kota Bandung yang bekerja. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan/ secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pada tahun 2019, persentase status pekerjaan utama ini mencapai 60,40 persen dari penduduk yang



bekerja. Dibandingkan tahun 2018 yang persentasenya sebesar 61,84 persen, persentase ini sedikit menurun.

Status berusaha sendiri merupakan status pekerjaan utama kedua terbanyak di Kota Bandung. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Pada tahun 2019, status pekerjaan utama ini mencapai 20,73 persen. Persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2018 yang sebesar 20,72 persen.

Persentase penduduk yang bekerja yang berusaha sendiri dengan dibantu buruh dibayar adalah sebesar 6,56 persen. Persentase ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,58 persen. Bahkan merupakan persentase terbesar di tiga tahun terakhir. Perkembangan ini menunjukkan bahwa wirausaha di Kota Bandung berkembang dengan baik.

Pada tahun 2019, di Kota Bandung penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri, baik sendiri, dibantu buruh dibayar, dan dibantu buruh tidak dibayar, mencakup 32,72 persen. Persentase ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 32,57 persen. Keberadaan wirausaha ini sangat penting karena dapat turut meningkatkan roda perekonomian Kota Bandung. Para wirausahawan mampu membuat lapangan kerja secara mandiri, tidak menunggu pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Pekerja bebas di lapangan usaha non pertanian sedikit meningkat di tahun 2019. Persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pekerja bebas di lapangan usaha non pertanian tahun 2019 adalah 2,83 persen sedangkan di tahun 2018 sebesar 2,78 persen. Sedangkan pekerja bebas di pertanian naik menjadi 0,14 persen. Para pekerja bebas perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pekerja bebas memiliki pekerjaan yang tidak tetap membuat rentan untuk kehilangan pekerjaan. Keberadaan proyek pembangunan biasanya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan status



pekerjaan ini. Sedangkan pekerja bebas di pertanian biasanya sangat tergantung pada cuaca, sehingga di saat cuaca tidak mendukung proses tanam, maka pekerja bebas di lapangan usaha ini akan kehilangan mata pencahariannya.

### 5.4. Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*).

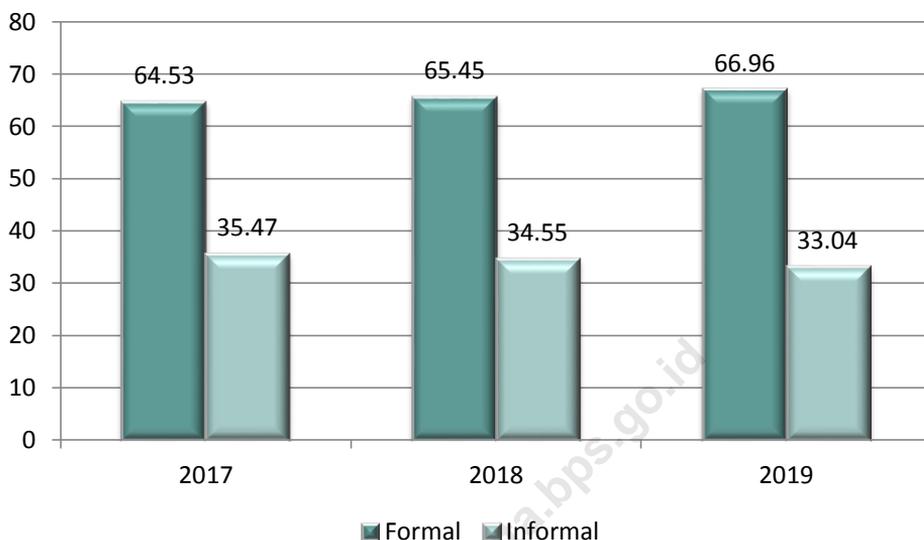
ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai "karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) berusaha sendiri informal dan (2) pekerja upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008).





**Grafik 14. Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kota Bandung 2017-2019 (persen)**



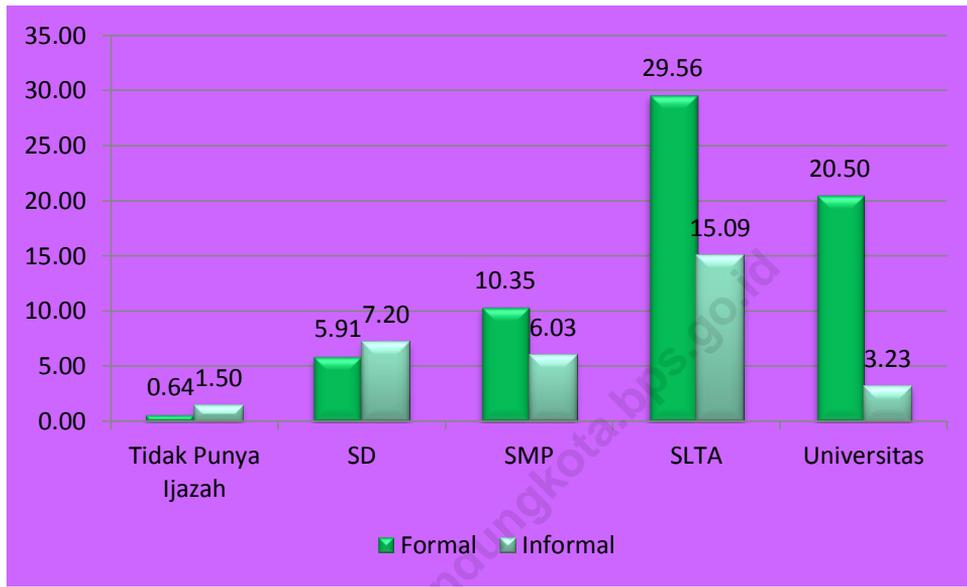
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2019

Penduduk yang bekerja di Kota Bandung sebagai pekerja formal semakin meningkat persentasenya selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 persentase pekerja formal di Kota Bandung mencapai 66,96 persen, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 65,45 persen. Sebaliknya, pekerja persentase pekerja informal di Kota Bandung menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019.

Keterlibatan penduduk dalam dunia pekerjaan cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki kecenderungan seseorang untuk bekerja pada sektor formal. Seperti pada Grafik 14 bahwa penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja informal memiliki persentase lebih besar pada penduduk yang berpendidikan terakhir SD atau tidak punya ijazah.



**Grafik 15. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja sebagai Pekerja Formal dan Informal Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, di Kota Bandung 2019 (persen)**



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat, 2019, diolah

Angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMP, SMA, dan universitas lebih banyak yang bekerja di sektor formal. Penduduk yang berpendidikan SMA/SMK sederajat mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan penyerapan di sektor formal sebesar 29,56 persen dan sektor non formal sebesar 15,09 persen. Penduduk dengan pendidikan universitas, 20,50 persen bekerja di sektor formal dan 3,23 persen bekerja di sektor informal. Sedangkan pada angkatan kerja yang tidak punya ijazah dan berijazah tertinggi SD lebih banyak bekerja di sektor non formal. Perbedaan ini dapat mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan memberi sedikit pengaruh pada perbedaan sektor yang dimiliki oleh angkatan kerja.





## Bab VI PERUMAHAN

Menurut Undang-Undang no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Rumah sendiri memiliki arti sebagai tempat untuk melepas lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan kewajiban sehari-hari, sebagai tempat bergaul dengan keluarga, sebagai tempat untuk melindungi diri dari bahaya, sebagai tempat menyimpan kekayaan (Azwar,1996).

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok disamping kebutuhan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu keadaan perumahan dan lingkungannya dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga diantaranya dapat dilihat dari kualitas material yang mencakup jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan. Untuk melihat bagaimana kondisi suatu rumah dapat dilihat dari luas lantai yang cukup memadai sehingga dapat memberikan kenyamanan serta udara Segar bagi pemiliknya. Di samping itu dilihat pula fasilitas fasilitas lain yang berkaitan dengan sarana sarana kesehatan seperti sumber air minum, jamban/kaskus, serta sumber penerangan yang digunakan.

Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.



## 6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Menurut Departemen Kesehatan RI, rumah sehat merupakan bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial sehingga seluruh anggota keluarga dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Ada beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

**Tabel 14. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Bandung 2018 -2019 (Persen)**

Indikator	2018	2019
(1)	(3)	(4)
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes	98,32	98,36
Dinding terluas tembok dan kayu	99,04	98,31
Rata-rata luas lantai per kapita $\geq 10$ m <sup>2</sup>	67,87	59,84

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2018-2019

Berdasarkan hasil Susenas 2019, sebagian besar rumah di Kota Bandung telah beratap benton, genteng, sirap, seng dan asbes. Demikian pula dengan dinding rumah, sebagian besar rumah tangga di Kota Bandung telah berdidinding terluas tembok. Namun demikian masih terdapat rumah dengan atap bukan beton, genteng, sirap, seng dan asbes.





Dan masih terdapat sedikit rumah yang berinding bukan tembok dan kayu. Rumah tangga ini perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kualitas hunian mereka.

Berkaitan dengan rumah sehat, WHO (Badan Kesehatan Dunia) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan rumah sehat jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup> oleh karena data hasil susenas tahun 2019 menunjukkan bahwa di Kota Bandung mengalami penurunan rata rata luas lantai perkapita dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2019 terdapat 59,84 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita diatas 10 m<sup>2</sup>, menurun dari tahun 2018 yang sebesar 67,87 persen.

Semakin kecilnya luas lantai per kapita pada sebuah rumah tangga menunjukkan bahwa luas rumah yang ditempati tidak sebanding dengan banyaknya orang yang menghuni rumah tinggal tersebut. Hal ini mengindikasikan pula terdapat rumah tangga di Kota Bandung yang belum mampu untuk memiliki hunian dengan luas per kapita yang sesuai dengan rekomendasi kesehatan.

## 6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat (Sanropie, 1992).

Adapun persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) no 829/Menkes/SK/VII/1999 sebagai berikut: lokasi tanah atau bangunan, kualitas udara, kualitas tanah, prasarana dan sarana



lingkungan, vektor penyakit, penghijauan, bahan bangunan, komponen dan penataan ruangan, pencahayaan, kualitas udara, penyediaan air dan pembuangan limbah. Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Tabel 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kota Bandung 2018-2019 (persen)**

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Air Kemasan, isi ulang dan air Ledeng	85,32	89,34
Air Minum Bersih	93,30	94,89
Jamban Sendiri	78,98	75,18
Jamban Sendiri dengan tangki septik	45,09	41,56
Sumber Penerangan Listrik PLN	100	98,87

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2018-2019*

Berdasarkan hasil Susenas 2019 tercatat rumah tangga yang menggunakan air kemasan, isi ulang dan air ledeng sebagai sumber air minum di Kota Bandung adalah sebanyak 89,34 persen. Ini memperlihatkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 85,32 persen. Selain itu tercatat 94,89 persen rumah tangga di Kota Bandung telah menggunakan air minum bersih.

Untuk penggunaan jamban, terdapat 75,18 persen rumah tangga telah menggunakan jamban sendiri sedangkan masih ada yang menggunakan jamban bersama (20,51%), MCK (0,48%), bahkan masih ada yang tidak menggunakan jamban ketika buang air besar sebesar 3,40 persen.



UNICEF menyatakan bahwa sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk, serta minum air yang tidak aman berkontribusi terhadap 88% kematian anak akibat diare di seluruh dunia (Kemenkes RI) dari semua kematian yang berakar pada buruknya kualitas air dan sanitasi, diare merupakan penyebab kematian terbesar.

Perlu diperhatikan bahwa rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai pembuangan akhir tinja hanya meliputi 41,56 persen dari seluruh rumah tangga di Kota Bandung. 13,21 persen sisanya menggunakan SPAL, dan selebihnya yaitu 45,21 persen rumah tangga menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan akhir tinjanya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pencemaran sungai di Kota Bandung.

Fasilitas perumahan lain yang tak kalah penting adalah listrik. Listrik telah menjadi kebutuhan utama rumah tangga. Dalam hal ini, hampir seluruh rumah tangga di Kota Bandung menggunakan PLN sebagai sumber penerangan utama.

### **6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.



**Tabel 16. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tangga di Kota Bandung 2018-2019 (persen)**

Indikator	2018	2019
(1)	(3)	(4)
Milik sendiri	57,17	53,80
Lainnya	42,83	46,20

*Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2018-2019*

Berdasarkan hasil Susenas 2019, bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri di Kota Bandung adalah sebesar 53,80 persen. Sedangkan sisanya menempati rumah dengan status kontrak, rumah dinas, bebas sewa ataupun status kepemilikan lainnya. Meningkatnya persentase rumah tangga dengan cara selain milik sendiri dapat dikarenakan sebagian dari mereka menetap hanya untuk sementara, seperti karena tugas pekerjaan, kuliah/sekolah, ataupun yang lainnya. Namun ada juga yang memang karena kondisi ekonomi yang belum mapan untuk memiliki rumah sendiri dan juga harga rumah yang cukup mahal di ibukota Jawa Barat ini, sehingga mereka memilih untuk kontrak/sewa.





## **BAB VII TARAF DAN POLA KONSUMSI**

Pola konsumsi adalah suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi. Pola konsumsi bisa diartikan sebagai jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

### **7.1. Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran non makanan (non pangan). Pengeluaran rumah tangga sering digunakan sebagai proksi dari pendapatan rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan



atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 17. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bandung, 2017-2019**

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Padi-padian	50.153	58.052	60.242	2,83	2,99	3,05
2. Umbi-umbian	6.004	6.287	7.796	0,38	0,32	0,39
3. Ikan	35.380	38.413	45.404	1,99	1,98	2,30
4. Daging	50.586	47.131	48.806	2,85	2,42	2,47
5. Telur dan Susu	45.387	47.101	47.734	2,56	2,42	2,42
6. Sayur-sayuran	41.976	39.624	40.701	2,37	2,04	2,06
7. Kacang-kacangan	15.255	14.934	16.064	0,86	0,77	0,81
8. Buah-buahan	33.800	42.879	37.472	1,91	2,21	1,90
9. Minyak dan lemak	12.031	12.306	13.891	0,68	0,63	0,70
10. Bahan minuman	20.133	21.149	22.301	1,14	1,09	1,13
11. Bumbu-bumbuan	12.243	12.792	13.829	0,69	0,66	0,70
12. Konsumsi lainnya	15.674	14.345	13.774	0,88	0,74	0,70
13. Makanan dan minuman jadi	313.376	334.017	316.492	17,67	17,18	16,03
14. Tembakau dan sirih	83.664	75.616	85.352	4,72	3,89	4,32
<b>Makanan</b>	<b>735.661</b>	<b>764.646</b>	<b>769.859</b>	<b>41,48</b>	<b>39,34</b>	<b>38,99</b>
1. Perumahan	494.582	577.132	630.298	27,89	29,69	31,92
2. Barang dan jasa	279.782	289.606	312.500	15,78	14,90	15,83
3. Pakaian	48.994	65.069	56.467	2,76	3,35	2,86
4. Barang tahan lama	116.229	133.833	90.126	6,55	6,89	4,56
5. Pajak	53.634	58.752	63.264	3,02	3,02	3,20
6. Lainnya	44.690	54.737	51.825	2,52	2,82	2,62
<b>Bukan Makanan</b>	<b>1.037.910</b>	<b>1.179.128</b>	<b>1.204.480</b>	<b>58,52</b>	<b>60,66</b>	<b>61,01</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.773.571</b>	<b>1.943.775</b>	<b>1.974.339</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2017-2019

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Bandung pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.974.339,- yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar Rp 769.859,- dan Rp. 1.204.480,-,- untuk pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran per kapita penduduk





Kota Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengeluaran tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.352,-. Kenaikan ini lebih kecil dibandingkan kenaikan pengeluaran yang terjadi di tahun 2018 yang sebesar Rp 141.218,-.

Pada tahun 2019, pengeluaran makanan mencakup 38,99 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk Kota Bandung. Persentase ini relatif mengecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan penduduk Kota Bandung tahun 2017 adalah sebesar 41,48 persen, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 39,34 persen dan turun lagi di tahun 2019. Sebaliknya pengeluaran bukan makanan meningkat menunjukkan adanya peningkatan selama tiga tahun terakhir. Persentase pengeluaran bukan makanan tahun 2017 adalah 58,52 persen. Di tahun 2018 meningkat menjadi 60,66 persen dan meningkat lagi menjadi 61,01 persen di tahun 2019.

Pengeluaran sub kelompok makanan penduduk Kota Bandung untuk jenis makanan dan minuman jadi merupakan porsi tertinggi dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, yaitu sebesar 16,03 persen pada tahun 2019. Selama tiga tahun terakhir persentase ini mengalami penurunan, yaitu 17,67 persen di tahun 2017 dan 17,18 persen di tahun 2018.

Pengeluaran sub kelompok tembakau dan sirih merupakan pengeluaran konsumsi terbesar kedua di antara sub kelompok makanan lainnya. Pada tahun 2019, persentase pengeluaran tembakau dan sirih mencakup 4,32 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk Kota Bandung. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,89 persen.

Pengeluaran kelompok ketiga terbesar adalah pengeluaran sub kelompok padi-padian. Pada tahun 2019, pengeluaran padi-padian mencapai 3,05 persen dari seluruh pengeluaran konsumsi penduduk di Kota Bandung. Pengeluaran sub kelompok padi-padian mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 pengeluaran sub kelompok ini tercatat sebesar 2,83 persen, kemudian menjadi 2,99 persen di tahun 2018 dan kembali naik di tahun 2019.



Dalam waktu tiga tahun terakhir, pengeluaran bukan makanan didominasi oleh pengeluaran sub kelompok perumahan. Sub kelompok ini terdiri dari pengeluaran kontrak/sewa rumah, pemeliharaan rumah, biaya listrik, biaya air, biaya kendaraan bermotor, bahan bakar, dan biaya pos telekomunikasi. Persentase pengeluaran sub kelompok ini mengalami kenaikan persentase selama tiga tahun terakhir, yaitu 27,89 persen pada tahun 2017, 29,69 persen pada tahun 2018, dan 31,92 persen pada tahun 2019.

Pengeluaran sub kelompok barang dan jasa merupakan pengeluaran non makanan terbesar kedua. Pada tahun 2019 persentase pengeluaran kelompok ini mencapai 15,83 persen, naik dari persentase di tahun 2018 yang sebesar 14,90 persen. Pengeluaran sub kelompok ini di antaranya terdiri dari pengeluaran alat kebersihan pribadi dan lingkungan, pengeluaran kesehatan, biaya pendidikan, biaya hiburan, dan lainnya.

Pengeluaran konsumsi dapat pula dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan pengeluarannya, rumah tangga dibagi menjadi 40 persen pengeluaran terbawah, 40 persen pengeluaran tengah dan 20 persen pengeluaran teratas. Pola konsumsi untuk masing-masing kelompok pengeluaran rumah tangga memiliki pola yang berbeda.

Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah membelanjakan 60,72 persen pengeluarannya untuk pengeluaran makanan. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga maka semakin kecil proporsi pengeluaran makanan. Kelompok pengeluaran 40 persen tengah mengeluarkan 47,91 persen pengeluarannya untuk makanan. Sedangkan kelompok pengeluaran 20 persen teratas hanya mengeluarkan 26,35 persen untuk pengeluaran makanan.

Secara umum, kelompok makanan jadi merupakan pengeluaran konsumsi terbesar di semua kelompok rumah tangga. Namun rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah merupakan kelompok rumah tangga terbesar yang mengkonsumsi makanan/minuman jadi. Semakin tinggi pengeluaran di rumah tangga, maka persentase mengkonsumsi makanan jadi semakin kecil. Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah memiliki pengeluaran makanan/minuman jadi sebesar 22,10 persen. Sedangkan



rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen tengah membelanjakan 18,94 persen dari pengeluarannya untuk makan dan minuman jadi. Persentase di kelompok 20 persen teratas lebih kecil lagi, yaitu 12,21 persen.

**Tabel 18 Rata-rata Persentase Pengeluaran Makanan per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga Di Kota Bandung 2019**

Jenis Pengeluaran	Kelompok Pengeluaran Rumah Tangga		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen atas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Padi-padian	6,86	3,81	1,40
2. Umbi-umbian	0,78	0,51	0,20
3. Ikan	3,38	2,77	1,65
4. Daging	3,42	2,98	1,84
5. Telur dan Susu	3,53	2,91	1,75
6. Sayur-sayuran	3,66	2,56	1,24
7. Kacang-kacangan	1,43	1,09	0,44
8. Buah-buahan	2,37	2,27	1,50
9. Minyak dan lemak	1,40	0,86	0,39
10. Bahan minuman	1,98	1,45	0,65
11. Bumbu-bumbuan	1,10	0,87	0,46
12. Konsumsi lainnya	1,24	0,93	0,38
13. Makanan dan minuman jadi	22,10	18,94	12,21
14. Tembakau dan sirih	7,48	5,96	2,25
<b>Makanan</b>	<b>60,72</b>	<b>47,91</b>	<b>26,35</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019

Pengeluaran tembakau dan sirih per kapita merupakan pengeluaran terbesar kedua di seluruh kelompok dengan pengeluaran terbesar adalah kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yaitu mencapai 7,48 persen. Semakin tinggi kelompok pengeluaran, maka pengeluaran untuk tembakau dan sirih semakin kecil. Demikian pula dengan pengeluaran per kapita untuk padi-padian yang sebesar 6,86 persen merupakan pengeluaran terbesar ketiga di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan terbesar



dibandingkan dua kelompok pengeluaran lainnya dan semakin mengecil dengan naiknya pengeluaran.

Pengeluaran sub kelompok makanan di pengeluaran 20 persen teratas sedikit berbeda dengan dua kelompok pengeluaran lainnya. Pengeluaran daging adalah pengeluaran terbesar ketiga di kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Sedangkan pengeluaran ketiga terbesar di dua kelompok lainnya adalah padi-padian. Di kelompok 20 persen teratas, pengeluaran untuk padi-padian hanya sebesar 1,40 persen, lebih kecil dari pada pengeluaran daging, telur, ikan dan buah.

Sedangkan pengeluaran bukan makanan sebagian besar dilakukan oleh kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Cakupan pengeluaran bukan makanan untuk kelompok tersebut mencapai 73,65 persen. Sedangkan untuk kelompok 40 persen tengah sebesar 52,09 persen dan untuk pengeluaran 40 persen terbawah sebesar 39,28 persen. Kelompok 20 persen teratas memiliki persentase terbesar untuk seluruh komponen pengeluaran bukan makanan dibanding dua kelompok pengeluaran lainnya.

**Tabel 19. Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Bandung, 2019 (Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	Persentase (%)		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen atas
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Perumahan	23,69	29,28	36,20
2. Barang dan jasa	9,29	13,25	19,56
3. Pakaian	2,43	2,85	2,99
4. Barang tahan lama	0,92	2,67	6,97
5. Pajak	2,01	2,58	3,99
6. Lainnya	0,94	1,45	3,94
Bukan Makanan	39,28	52,09	73,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019



Barang dan Jasa merupakan komponen pengeluaran terbesar kedua untuk seluruh kelompok pengeluaran. Persentase pengeluaran barang dan jasa di kelompok 20 persen teratas dua kali lebih besar dari pengeluaran barang dan jasa di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah. Perbedaan juga ditunjukkan di komponen barang tahan lama. Pengeluaran barang tahan lama di kelompok 20 persen teratas tujuh kali lebih besar daripada kelompok 40 persen terbawah.

Pengeluaran pakaian tidak terlalu berbeda antar kelompok pengeluaran. Kelompok 40 persen terbawah membelanjakan 2,43 persen pengeluarannya untuk pakaian dan perlengkapannya. Pengeluaran pakaian di kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah sebesar 2,85 persen, dan pengeluaran di kelompok 20 persen teratas adalah sebesar 2,99 persen.

## **7.2. Konsumsi Energi dan Protein**

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut.

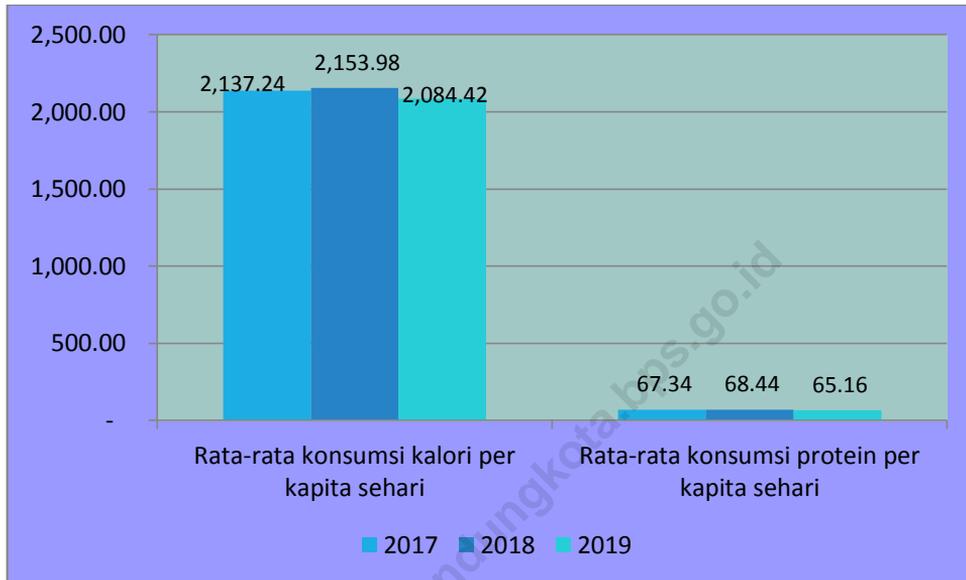
Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012) rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Kota Bandung per kapita per hari cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 rata-rata konsumsi kalori penduduk Kota Bandung per hari sebesar 2.084,42 kkal, turun dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 2.607,75 kkal. Sedangkan konsumsi protein per



hari adalah 65,16 gram, turun dari konsumsi di tahun 2018 yang sebesar 68,44 gram, bahkan lebih kecil daripada konsumsi di tahun 2017 yang sebesar 67,34.

**Grafik 16. Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) dan Protein (gram) Per Kapita Sehari di Kota Bandung, 2017-2019**



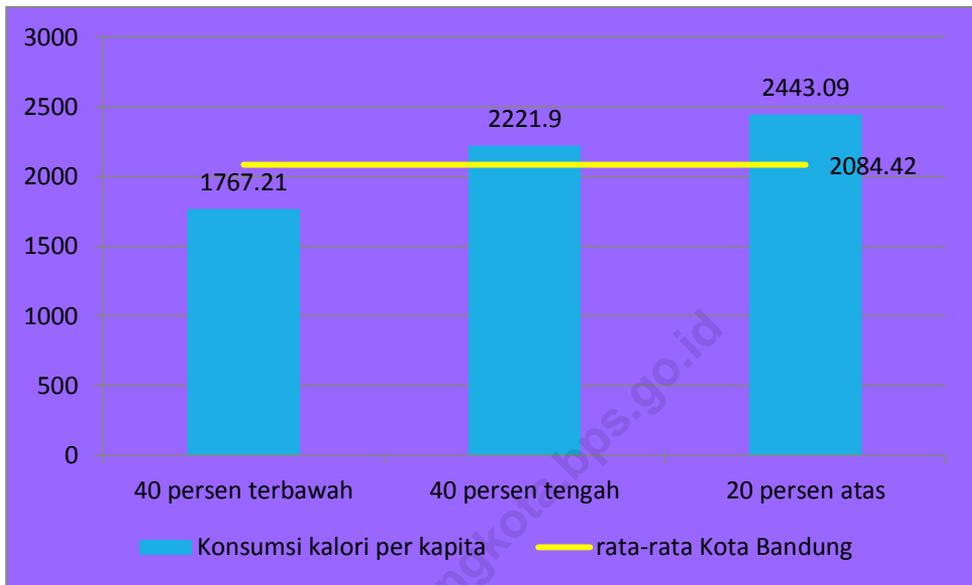
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2017-2019

Di tahun 2019, rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah adalah 1.767,21 kkal. Konsumsi ini merupakan konsumsi paling kecil dibandingkan dua kelompok lainnya. Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen atas adalah 2.221,90 kkal dan 2.443,09 kkal. Jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari Kota Bandung, rata-rata konsumsi kalori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah berada di bawah rata-rata Kota Bandung. Sedangkan rata-rata konsumsi kalori per kapita per harinya untuk dua kelompok pengeluaran lainnya berada di atas rata-rata konsumsi Kota Bandung.





Grafik 17. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Bandung, 2019 (Kkal)

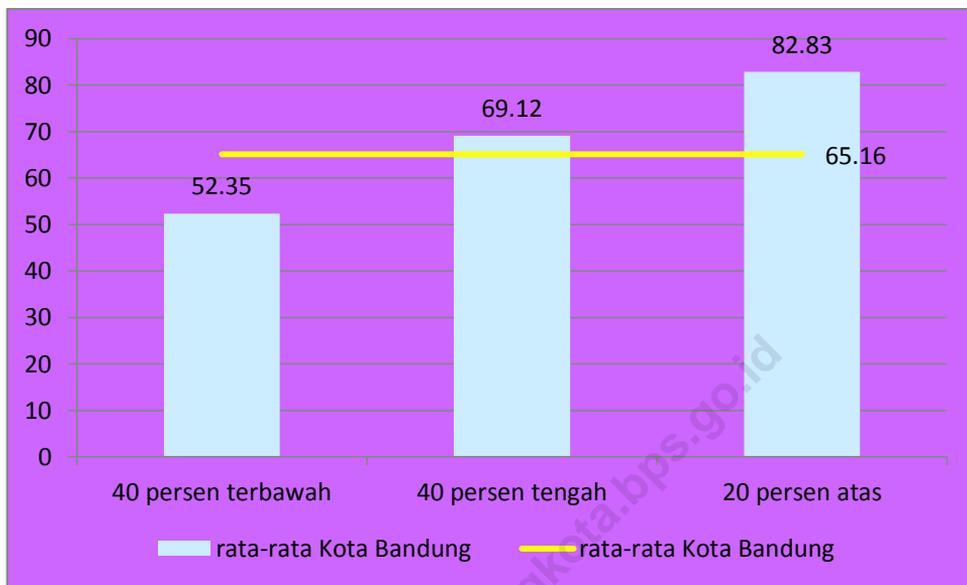


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019

Pada tahun 2019, rata-rata konsumsi protein per kapita per harinya juga berbeda antar kelompok pengeluaran. Sama seperti konsumsi kalori, rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah mengkonsumsi protein paling sedikit dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Rata-rata konsumsi protein per kapita per harinya di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah adalah 52,35 gram, lebih rendah dari rata-rata konsumsi protein Kota Bandung yang sebesar 65,16 gram. Rumah tangga dengan pengeluaran 20 persen teratas mengkonsumsi protein paling tinggi yaitu 82,83 gram per kapita per harinya. Baik kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen atas, rata-rata konsumsi proteinnya berada di atas rata-rata konsumsi protein Kota Bandung.



Grafik 18. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari di Kota Bandung, 2019 (Gram)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2019

Jika dibandingkan dengan kecukupan akan energi dan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, di mana energi yang diperlukan oleh tubuh manusia adalah 2.100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan protein adalah 57 gram per kapita per hari, maka terdapat kondisi yang berbeda antara konsumsi kalori protein dan kalori penduduk Kota Bandung. Secara umum, penduduk Kota Bandung mengkonsumsi kalori lebih kecil daripada yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Sedangkan konsumsi protein, secara rata-rata telah memenuhi rekomendasi sebesar 57 gram per harinya. Rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terbawah mengkonsumsi kalori dan protein di bawah rekomendasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam mendapatkan kalori dan protein di masyarakat. Kurangnya kalori dan protein akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas dari penduduk.



## BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya di antaranya adalah akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi, akses masyarakat terhadap layanan usaha, perjalanan wisata dan tingkat keamanan wilayah. Dalam bab ini akan di bahas mengenai akses informasi dan komunikasi serta akses kredit.

Perkembangan teknologi menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan masa kini. Berbagai layanan masyarakat seperti pun sudah beralih dari metode konvensional menjadi digital, seperti jual beli, layanan pembayaran, dan sebagainya. Era digital menjadikan media sosial menjadi ajang sosialisasi dengan dunia luar.

Akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar (*smartphone*) dan komputer. Harga telepon pintar (*smartphone*) yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

### 8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang di Kota Bandung. Kontribusi lapangan usaha Informasi dan Teknologi pada perekonomian naik di tahun 2019 menjadi 10,29 persen. Pada tahun 2019 nilai tambah lapangan usaha ini mencapai 29.762 miliar rupiah.

Alat yang sering digunakan untuk mengakses informasi dan komunikasi adalah telepon selular dan laptop. Pada tahun 2019 di Kota Bandung tercatat 82,25 persen anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler/nirkabel/computer/laptop. Rata-rata persentase penggunaan alat teknologi



informasi tersebut pada anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas di Kota Bandung adalah 82,25 persen. Anggota rumah tangga laki laki lebih banyak menggunakannya dibanding anggota rumah tangga perempuan, yaitu 83,80 persen untuk anggota rumah tangga laki-laki dan 80,69 persen untuk penduduk perempuan.

Akses internet di Kota Bandung cukup tinggi. Dari data Susenas 2019 diketahui bahwa akses internet dilakukan oleh 72,82 persen anggota rumah tangga usia 5 tahun ke atas. Persentase ini meningkat dibandingkan persentase akses internet di tahun 2018 yang sebesar 67,80. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Bandung sudah terbiasa dengan internet.

**Tabel 20 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet 3 Bulan Terakhir Menurut Karakteristik di Kota Bandung, 2018-2019**

Kelompok Pengeluaran	Akses Internet	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
<b>Kuintil Pengeluaran?</b>		
40 persen terbawah	53,79	63,60
40 persen tengah	71,49	74,15
20 persen atas	87,16	87,54
<b>Pendidikan Tertinggi ART</b>		
SD ke bawah	40,11	43,05
SMP ke atas	82,75	87,76
Kota Bandung	67,80	72,82

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2018-2019

Jika dilihat berdasarkan pengeluarannya, seluruh penduduk usia 5 tahun ke atas di semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan persentase. Kenaikan terbesar berada di kelompok 40 persen terbawah. Pada tahun 2019, persentase anggota rumah tangga di kelompok pengeluaran yang mengakses internet mencapai 63,60 persen, naik dari persentase 2018 yang sebesar 53,79 persen.



Anggota rumah tangga yang termasuk 20 persen teratas mengakses internet terbesar dibandingkan dua kelompok lainnya. Pada tahun 2019, akses internet yang dilakukan oleh anggota rumah tangga dengan pengeluaran tersebut mencapai 87,54 persen, di atas rata-rata Kota Bandung yang sebesar 72,82 persen.

Anggota rumah tangga yang berusia 5 tahun ke atas yang berpendidikan SD ke bawah mengakses internet lebih sedikit daripada anggota rumah tangga yang berpendidikan SMP ke atas, yaitu sebesar 43,05 persen. Persentase ini jauh lebih kecil dari anggota rumah tangga yang pendidikan SMP ke atas yang sebesar 87,76 persen. Namun demikian, anggota rumah tangga di kedua kelompok tersebut mengalami peningkatan akses internet dibandingkan dengan tahun 2018.

## 8.2 Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan hal penting di masyarakat, Keberadaan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar menjadikan perlindungan sosial masih diperlukan. Dalam undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan diarahkan adar masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.

Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa bentuk perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH).

BNPT adalah bantuan sosial dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-



## Sosial Lainnya

voucher) dari Bank Penyalur yang dapat digunakan KPM untuk membeli beras di e-waroeng.

Program perlindungan sosial juga mencakup bidang pendidikan. Bantuan diberikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu bantuan tunai kepada anak usia sekolah (usia 6 -21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memberi perlindungan sosial kepada keluarga miskin. Sasaran PKH adalah Keluarga miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat.

**Tabel 21. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial Yang Diterima di Kota Bandung, 2018-2019 (Persen)**

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga Yang Menerima	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Raskin/Rastra/BNPT	5,15	5,21
Program Indonesia Pintar (PIP)	9,86	4,41
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	8,02	5,41
Program Keluarga Harapan (PKH)	2,73	3,83

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2018-2019

Dari data Susenas diketahui bahwa keluarga miskin di Kota Bandung mendapatkan perlindungan sosial berupa berbagai macam bentuk bantuan. Pada tahun 2019 Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) diterima oleh 5,21 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 5,15 persen.

Program Indonesia Pintar diterima oleh 4,41 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun



sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena anak usia sekolah yang dibantu oleh PKH telah keluar dari kriteria usia dan pendidikan yang disyaratkan, sedangkan hasil pendataan baru belum terealisasi.

Pada tahun 2019, penerima bantuan KPS/KKS mencakup 4,41 persen dari rumah tangga di Kota Bandung. Persentase ini pun menunjukkan penurunan yang cukup besar dibanding persentase tahun sebelumnya yang sebesar 8,02 persen. Sedangkan bantuan program PKH diterima oleh 3,83 persen rumah tangga di Kota Bandung. Persentase rumah tangga penerima PKH di Kota Bandung sedikit mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang sebesar 2,73 persen.

Perlindungan sosial memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perlindungan sosial, masyarakat kurang mampu akan memiliki akses yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian tidak ada satu warga masyarakat pun yang tidak mampu memenuhi keperluan dasar hidupnya.



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://bandungkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BANDUNG**

JL. Jendral Gatot Subroto No. 93 Bandung 40273  
Telp/Fax: (022) 7305091  
Homepage: <http://www.bandungkota.bps.go.id>